

**POLA REKRUTMEN POLITIK
PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA
(Studi terhadap Tujuh Partai Politik Peserta Pemilu 2004)**

Oleh : HALILI (004124017)

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan hukum, Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, email: halili@uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang digunakan partai politik besar di Indonesia dalam merekrut anggota, personel jabatan internal partai, dan seleksi kader partai untuk mengisi jabatan publik, serta menganalisis implikasi pola rekrutmen yang digunakan tersebut terhadap kelembagaan partai politik dan perpolitikan nasional.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*survey of literature*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa *paper*, yaitu AD/ART parpol, peraturan-peraturan terkait, artikel-artikel, dan pendapat tokoh yang tertuang dalam bentuk buku, paper, surat kabar, dan *website*. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi literatur dan analisis dokumen. Sedangkan pengujian keabsahannya menggunakan teknik triangulasi serta *intra* dan *inter rater validity*. Analisis data yang gunakan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pola rekrutmen anggota yang dilakukan oleh tujuh parpol besar peserta Pemilu 2004 dari aspek sifat menunjukkan kecenderungan inklusif, dengan tiga gradasi; sederhana, moderat, dan ekstrim. Dari aspek kedekatan ideologis, kecenderungan pola rekrutmen yang dilakukan menggambarkan lemahnya kerangka ideologis parpol (*weak ideological frame of parties*), kecuali PKS. Dari aspek preservasi keanggotaan, sebagian besar tujuh parpol besar tidak memiliki sistem kaderisasi yang handal, kecuali Partai Golkar dan PKS. (2) Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan kepartaian menunjukkan kecenderungan upaya internalisasi demokrasi prosedural, namun hanya menyentuh jabatan puncak. PKS menunjukkan kecenderungan lain, berupaya melakukan internalisasi demokrasi substansial dengan melakukan pemilihan internal, dengan penetapan Majelis Syuro. (3) Rekrutmen caleg dilakukan dengan model elitis-oligarkis, dimana penetapannya dilakukan oleh DPP. PKS menerapkan pola yang lebih demokratis, kewenangan rekrutmen didistribusikan kepada seluruh level kepengurusan, tidak ada wewenang Dewan Pengurus yang lebih tinggi untuk mengintervensi atau menganulir, penetapan nomor urut dilakukan melalui pemilihan internal dan DPP tidak berwenang mengubah urutan. (4) Implikasi pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik berimplikasi pada kecenderungan pelemahan kelembagaan partai politik, dalam empat dimensinya; *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy*, dan *reification*. (5) Kecenderungan dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol besar juga membawa implikasi pada pada; pergeseran perwakilan politik dari model quasi wali ke model partisan, sistem politik, dan iklim politik nasional; lemahnya *resources* struktur inti sistem politik, dan terganggunya pelaksanaan beberapa fungsi proseduralnya; dan mengakibatkan timbulnya konflik politik, munculnya politisi karbitan, dan berkembangnya kompetisi politik yang machiavellis.